



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA



2024

**Laporan Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan**

PP39

Inspektorat Jenderal

Triwulan II



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan II Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

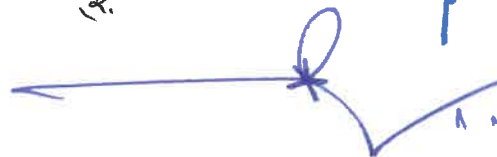
Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan tujuan untuk melihat realisasi fisik dan anggaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian periode triwulan II tahun 2024.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 11 Juli 2024

(R.) INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan II Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dengan tujuan untuk melihat realisasi fisik dan anggaran yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian periode triwulan II tahun 2024.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Juli 2024
INSPEKTUR JENDERAL

M. RUM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.	
PENDAHULUAN	4
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	4
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	4
I.3. Struktur Organisasi.....	5
BAB II.	
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	13
A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024	13
B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2024	16
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	20
III.1. Hasil yang Telah Dicapai	20
III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	42
III.4. Langkah Tindak Lanjut.....	42
BAB IV. PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal.....	14
Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal.....	16
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024	17
Tabel 4 Realisasi Anggaran per Unit Kerja Inspektorat Jenderal	21
Tabel 5 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal	21
Tabel 6 Capaian Renstra Inspektorat Jenderal.....	22
Tabel 7 Unit Kerja Yang memperoleh Predikat WBK WBBM.....	37
Tabel 8 Daftar Nilai SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian.....	40
Tabel 9 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2024	41

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2024 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

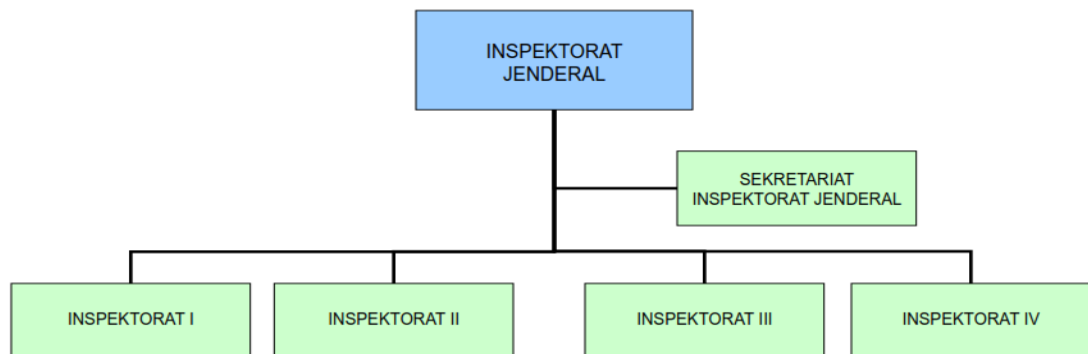
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksana evaluasi dan pelaporan Inspektorat Jenderal;
- b) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang pengawasan intern;
- c) Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- d) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama Inspektorat Jenderal;
- e) Penyiapan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat Inspektorat Jenderal;
- f) Penyiapan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern, serta evaluasi hasil pengawasan;
- g) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- h) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- i) Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, rumah tangga, barang milik negara, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------|
| a) Kabag Umum | : 1 orang; |
| b) Fungsional Arsiparis Madya | : 2 orang; |
| c) Fungsional Analisis SDMA Madya | : 1 orang; |
| d) Fungsional Analisis SDMA Muda | : 1 orang; |
| e) Fungsional Auditor Muda Muda | : 1 orang; |
| f) Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | : 1 orang; |
| g) Fungsional Perencana Ahli Muda | : 1 orang; |
| h) Staff | : 22 orang; |
| i) PPNPN | : 9 orang; |
| j) PPPK | : 7 orang. |

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

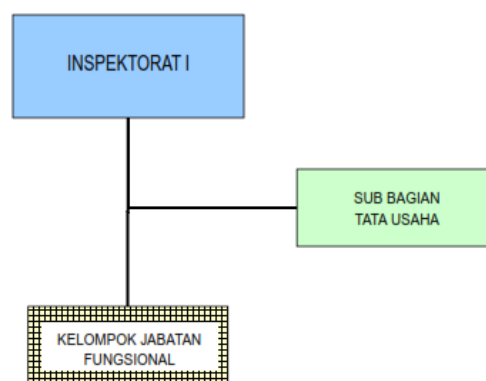
- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat I.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat I berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 orang;
- b) Auditor Madya : 2 orang;
- c) Auditor Muda : 5 orang;
- d) Auditor Pertama : 7 orang;
- e) Kasubag TU : 1 orang;
- f) PPPK : 1 orang;
- g) PPNP : 1 orang.



Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

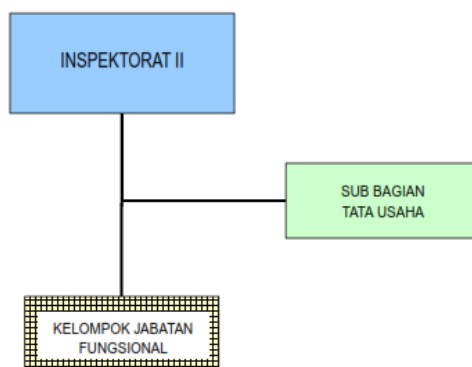
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
 - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat II.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat II berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 2 Orang;
- c) Auditor Muda : 5 Orang;
- d) Auditor Pertama : 7 Orang;
- e) Kasubag TU : 1 orang;
- f) Staf : 1 orang;
- g) PPNPN : 1 orang.



Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Inspektorat Jendral, Pusat Data dan Informasi, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Inspektorat III terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

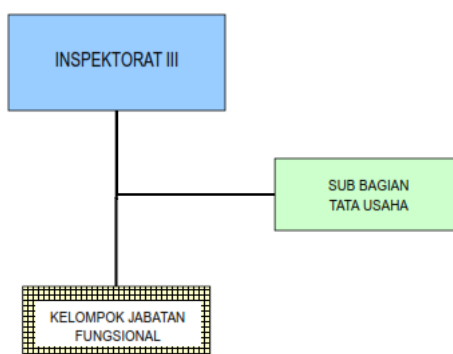
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat III.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat III berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Utama : 1 Orang;
- b) Auditor Madya : 2 Orang;
- c) Auditor Muda : 5 Orang;
- d) Auditor Pertama : 7 Orang;
- e) Kasubag TU : 1 orang;
- f) Staf : 1 orang;
- g) PPNPN : 1 orang.



Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal IndustriAgro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Pemberdayaan Industri Halal, dan perwakilan Kementerian di luar negeri.

Inspektorat IV terdiri dari:

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

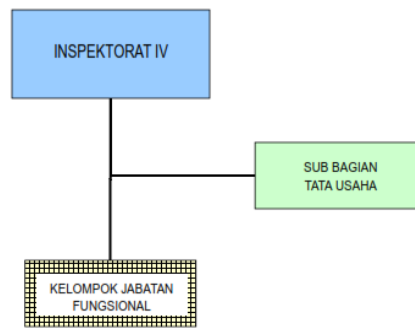
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat IV berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan detail sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|------------|
| a) Auditor Utama | : - Orang; |
| b) Auditor Madya | : 2 Orang; |
| c) Auditor Muda | : 6 Orang; |
| d) Auditor Pertama | : 6 Orang; |
| e) Kasubag TU | : 1 orang; |
| f) Staf | : 2 orang; |
| g) PPNPN | : 1 orang. |



Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II.

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”* yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”, dengan kegiatan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1 Output Kegiatan Inspektorat Jenderal

No	Program	Kegiatan	Output
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 4 laporan - 5 laporan - 197 laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran	- 1 dokumen - 5 dokumen

No	Program	Kegiatan	Output
	Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 26 laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 1 dokumen - 5 dokumen - 245 laporan
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Audit Internal	- 1 dokumen - 5 dokumen - 40 laporan
5	Pengelolaan Manajemen Keresetarian Bidang Pengawasan Internal	- Pengadaan Perangkat TIK - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal	- 30 Unit - 3 Layanan - 6 Layanan - 1 layanan - 12 layanan - 1 unit - 107 orang pegawai - 3 dokumen - 16 dokumen - 5 dokumen - 23 dokumen

*Sumber: Data POK Revisi 5 Tahun 2024

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2024 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp50.025.717.000,00.

B. Sasaran Program Tahun Anggaran 2024

Adapun Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Nilai	3,00
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Nilai	3,1

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,8 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <0,8% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	100%	Jumlah aduan yang masuk SP4N Lapor yang didistribusikan oleh Inspektorat Jenderal
		1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU	92,2%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus: (SR+BSR)/total rekomendasi (T-1), Misal: Penyusunan laporan kinerja tahun 2024, maka data yang digunakan adalah data audit yang dilakukan ditahun Januari-Desember tahun 2023.
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Nilai 3,00	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan <i>Quality Assurance</i> BPKP terhadap Kementerian Perindustrian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	85%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Nilai 3,1	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	90%	Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN) = $\frac{RAP3DN}{TotAP3DN}$ Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	80%	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus: $Er = \frac{SRe}{Ts}$

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
				Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.8	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
7.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	7.1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, rencana aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2024 terlampir pada dokumen ini.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Pada Triwulan II dilakukan revisi POK ke-3 sampai dengan revisi ke-5, dan tidak merubah pagu awal sebesar Rp50.025.717.000,-. Revisi ketiga terbit pada tanggal 22 April 2024. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka Buka Blokir pada detil Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp88.050.000. Revisi keempat terbit pada tanggal 22 Mei 2024. Revisi tersebut dalam rangka Revisi dalam rangka realokasi anggaran pada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai PNS dan PPPK, realokasi anggaran untuk kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2024, serta Belanja Modal untuk Keperluan Rumah Dinas Inspektur Jenderal. Sedangkan revisi kelima dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-3876/WPB.12/2024 tanggal 20 Mei 2024 hal Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Dalam Rangka Penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA Periode Triwulan II Tahun 2024.

Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan II ini mayoritas merupakan pelaksanaan kegiatan dan juga pada triwulan selanjutnya, persiapan ini telah terlaksana dengan baik. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian pada Triwulan II Tahun 2024 (Januari-Juni) mencapai Rp20.110.163.675 atau 40,20% dari total pagu anggaran sebesar Rp50.025.717.000,-. Jumlah anggaran yang di blokir di triwulan II ini mencapai Rp2.423.664.000 atau mencapai 4,84% dari total dana yang tersedia saat ini. Komposisi jumlah anggaran yang terblokir paling banyak terjadi pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dan masing-masing Inspektorat diblokir dengan jumlah yang sama. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Realisasi Anggaran per unit kerja Inspektorat Jenderal

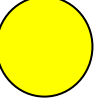
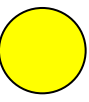
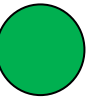
Kegiatan	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan II		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia	
		Keuangan (Rp.)	%			J u m l a h (Rp)	%
Inspektorat I	3.450.000.000	1.686.386.888	48,88	350.000.00	0	1.413.613.112	40,97
Inspektorat II	3.450.000.000	708.128.040	20,53	350.000.00	0	2.391.871.960	69,33
Inspektorat III	3.450.000.000	1.348.555.970	39,09	350.000.000	0	1.751.444.030	50,76
Inspektorat IV	3.450.000.000	935.967.780	27,13	350.000.000	0	2.164.032.220	62,72
Set Itjen	36.225.717.000	15.431.124.997	42,60	1.023.664.000	0	19.770.928.003	54,57
T O T A L	50.025.717.000	20.110.163.675	40,20	2.423.664.000	0	27.491.889.325	54,95

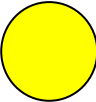
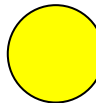
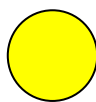
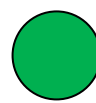
Tabel 5 Realisasi per Jenis Belanja Anggaran Inspektorat Jenderal

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	19,811,105,000	9,616,372,865	48.54	0	0	10,194,732,135
2	52 Belanja Barang	27,494,612,000	9,852,633,810	34.79	0	2,423,664,000	16,047,435,190
3	53 Belanja Modal	2,720,000,000	641,157,000	33.91	0	0	1,249,722,000
Jumlah		50,025,717,000	20,110,163,675	40.20	0	2,423,664,000	27,491,889,325
Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto							
Sumber Data: SPAN per 30 Juni 2024							

III.2. Analisa Capaian Kinerja

Tabel 6 Capaian Renstra Inspektorat Jenderal

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	0,8%	Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian indikator batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada triwulan ini adalah sebagai berikut: - Follow Up permintaan dokumen pemeriksaan BPK; - Pelaksanaan Revaluasi BMN sampai tindak lanjutnya - Koordinasi ke DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara); - tindak lanjut saldo dekon dan pemutakhirannya; - Pre Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian Tahun 2022 oleh BPK-RI; - Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Semester I Tahun 2023; - Hasil dari koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal Tahun 2022 masih dalam tahap proses penilaian oleh BPK.	
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal	100%	Kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan indikator ini adalah pengelolaan SP4N Lapori. sampai dengan triwulan II dapat dilaporkan bahwa selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni Tahun 2024 telah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) laporan yang masuk. semua laporan telah terdistribusi kepada Unit Eselon 1 dan Pusat.	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *IKU	92,2%	Rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal sebesar 100% dengan total rekomendasi 1257. Tindak Lanjut sesuai rekomendasi sebanyak 974, belum sesuai rekomendasi sebanyak 131 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 152.	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II	Keterangan
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Sampai dengan Triwulan II, kegiatan pendukung indikator ini telah dilaksanakan melalui himbauan agar tiap Inspektorat memenuhi dokumen Peta Risiko masing-masing Inspektorat, namun belum diserahkan ke Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk di kompilasi menjadi Peta Risiko Inspektorat Jenderal. Selain itu telah dilaksanakan rapat pembahasan Peta Risiko Inspektorat Jenderal.	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	• Inspektorat I: belum melaporkan • Inspektorat II: 89,57% • Inspektorat III: 89,14% • Inspektorat IV: 85,31 Indikator ini dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan, dalam hal ini auditi Inspektorat Jenderal	
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3.1 IACM	Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung Capaian IACM Inspektorat Jenderal di Triwulan II adalah sebagai berikut: - Rekapitulasi hasil evaluasi AKIP sementara untuk bahan rapat pleno evaluasi AKIP Tingkat Unit Eselon I; - Sedang dalam proses penerbitan majalah Solusi Semester I tahun 2024; - Proses penyusunan Laporan analisis dan evaluasi hasil pengawasan dilakukan diakhir tahun - Penyusunan dan revisi RKAKL Inspektorat Jenderal sampai dengan revisi 5; - Penyusunan SK (Surat Keputusan) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan; - Telah dilaksanakan beberapa diklat penjenjangan.	
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	80%	• Inspektorat I : 85% • Inspektorat II : 95,5% • Inspektorat III : 100% • Inspektorat IV : 100% Tahapan kegiatan TABK adalah tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, penelaahan analisis,	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II	Keterangan
				penyusunan kertas kerja, ikhtisar, tahap pelaporan.	
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	90%	- Koordinasi dalam rangka persamaan persepsi dalam rangka pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); - Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri pada Triwulan II. Berikut adalah realisasi PDN dibagi dengan Pagu anggaran $4.121.415.834 / 12.171.333.000 = 33,86\%$	
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas Regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	80%	Telah dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Biro Perencanaan terkait narasi peraturan evaluasi SAKIP	
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.8	Telah dilaksanakan Penilaian SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian. Pada Penilaian tersebut, Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 82,35. Rincian perolehan nilai Inspektorat Jenderal terdiri dari Perencanaan Kinerja dengan nilai 25,20; Pengukuran Kinerja dengan nilai 26,10; Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,30; dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 18,75	
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	100%	Inspektorat I: 100% Inspektorat II: 100% Inspektorat III: 19% Inspektorat IV: 100% Indikator ini diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang telah selesai dilakukan berdasarkan PKPT cakupan tugas masing-masing Inspektorat	
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	- Inspektorat I: 100% - Inspektorat II: 100% - Inspektorat III: 100 % - Inspektorat IV: 100% Tingkat kesesuaian diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Realisasi TW II saat ini belum merupakan realisasi terakhir.	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II	Keterangan
				Nilai akhir akan diperoleh di akhir tahun.	
		Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	76%	Survey kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal pada semester I Tahun 2024 sebesar 80% (masuk dalam kategori sangat puas) melebihi target yang ditetapkan sebesar 76%.	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	77	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II Tahun 2024 sebesar 97,49 . Nilai IKPA ini bersifat fluktuatif sampai dengan akhir tahun anggaran. Delapan indikator yang dinilai dan menjadi masing-masing bobot pada nilai IKPA adalah Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan capaian output	
8.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72	Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal Tahun 2024 belum dilaksanakan. Rencana pelaksanaan di Triwulan IV. Sebelumnya di bulan Juni telah diadakan Sosialisasi IP ASN yang berlaku di Kementerian Perindustrian oleh Biro OSDM.	
		Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	75%	PKS yang telah dilaksanakan di Inspektorat Jenderal selama Triwulan I – Triwulan II sebanyak 2 PKS, yaitu: 1. PKS Regulasi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor; 2. PKS Reviu Atas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU).	
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	78%	- Manajemen SDM APIP pada keikutsertaan diklat, terdiri dari diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama sebanyak 1 orang, diklat perjenjangan Auditor Ahli Muda sebanyak 6 orang, Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Madya sebanyak 7 orang, Pelatihan/Seminar/Konferensi/Sertifikasi/Bimtek Workshop, dll sebanyak	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Analisa Capaian TW II	Keterangan
				1 orang, Diklat Fungsional/ Teknis Administrasi sebanyak 2 orang; -Rekapitulasi diklat akan dihitung di Triwulan IV	

Keterangan :



: Telah tercapai



: Tidak Tercapai



: Dalam proses pelaksanaan

Kegiatan pada triwulan II yang telah dilaksanakan pada April hingga Juni 2024 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pimpinan

- Pertemuan dengan Ketua Umum API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia);
- Rapat Internal, Agenda: Pembahasan RPermenperin tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan Tes Pasar, dan/atau Barang untuk Pelayanan Purna Jual;
- Rapat Persiapan Pengisian JPT Kemenperin;
- Rapat Internal Terbatas, Agenda: Pembahasan Situasi di Timur Tengah dan Kondisi Politik Global: Dampaknya pada Sektor Industri Dalam Negeri dan Mitigasi di Masing-masing Sektor;
- Perjalanan dinas ke Palembang dalam rangka Pembinaan Integritas pada Satuan Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang;
- Perjalanan dinas ke Palembang dalam rangka Kunjungan Kerja dalam rangka Penguatan Manajemen Risiko pada Satuan Kerja Wilayah Pontianak;
- Rapat Pembahasan Seleksi Administrasi JPT di Lingkungan Kemenperin;
- Rapat Internal, Agenda: Permendag 36, Issue Komplementer;
- Menghadiri peluncuran JARVIS BERSAMA 2024;
- Menghadiri *Business Matching* IKM Pangan dan Furnitur dengan HIPINDO;
- Menghadiri Rapat Pembahasan Penilaian *Policy Brief* / Makalah, Seleksi Terbuka JPT Kemenperin;
- Kunjungan kerja dalam rangka mengawal penerapan manajemen risiko ke satker wilayah Bandung;

- Mendampingi Menteri dalam acara Paparan Dirjen IKMA terkait Progress BPIPI dan BCIC;
- Melakukan pemeriksaan khusus Pelanggaran Disiplin PNS;
- Menjadi tim penilai pada seleksi JPT Kemenperin;
- Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2024 yang diadakan oleh BPKP;
- Mengikuti proses penerbitan Persetujuan Teknis;
- Melakukan kunjungan kerja untuk meninjau peran serta BSPJI Banjarbaru dalam perkembangan Kalimantan Selatan;
- Mendampingi Menteri Perindustrian pada Kunjungan Kerja di RRT (Republik Rakyat Tiongkok);
- Kunjungan Kerja ke Satker Wilayah Medan;
- Pembahasan Evaluasi Rekam Jejak dan Hasil Penilaian Seleksi Terbuka JPT di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Menghadiri *Business Matching* Industri pengolahan rumput laut dengan industri pengguna;
- Rapat Internal Terbatas dengan Agenda: Percepatan Penyelesaian Perundingan IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement);
- Rapat Internal Terbatas dengan Agenda: Kebijakan Industri Tekstil;
- Rapat Internal, Agenda: Pembahasan Terkait TKDN;
- Mendampingi Menteri dalam Rangka Wawancara Calon Pejabat Eselon II.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Inspektorat I

- Reviu revisi anggaran pada BPSDMI;
- Pengawasan Pembangunan Gedung SMK SMAK Bogor;
- Pengawasan Pembangunan Gedung IMC Plered Purwakarta;
- Evaluasi SAKIP Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan BPSDMI TA 2023;
- Reviu Dokumen Tunggakan pada Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2023;
- Survei Kepuasan dan Registrasi Tindak Lanjut melalui Aplikasi ALKI Intranew pada Satuan Kerja di Satuan Kerja di Bogor;

- Pengawasan Pembangunan Gedung Politeknik Industri Petrokimia Banten;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara pada Politeknik ATI Makasar, SMK SMAK Makasar, BDI Makassar;
- Pengawasan Kegiatan Jarvis Kementerian Perindustrian Tahun 2024 di STTT Bandung;
- Evaluasi SAKIP Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan BPSPMI TA 2024;
- Survei Kepuasan dan Registrasi Tindak Lanjut melalui Aplikasi ALKI Intranew pada IFPK Kendal;
- Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara TA 2023 pada Politeknik PTKI Medan, BDI Medan, BDI Surabaya, BDI Denpasar;
- Survey Kepuasan dan Registrasi Tindak Lanjut melalui Aplikasi ALKI Intranew pada Satuan Kerja di Satuan Kerja di Medan;
- Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja Vertikal Kementerian Perindustrian di APP Jakarta, SMTI Jakarta, lokasi Pembangunan Indonesia Manufacturing Center (IMC);
- Koordinasi dan Monitoring Persiapan Audit Kinerja Pada BPIPI Sidoarjo, Koordinasi Pembangunan BCIC Denpasar, FGD Pendahuluan dan Sosialisasi Penyusunan Kajian Neraca Penyediaan dan Permintaan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turun;
- Pengawasan dan Asistensi pada satuan kerja di SMTI Pontianak dan Baristand Pontianak;
- Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja Vertikal Kementerian Perindustrian di APP Jakarta;
- Mendampingi Pimpinan Mengkoordinir Tim Koordinasi dan Monitoring Persiapan Audit Kinerja Pada BPIPI Sidoarjo, Koordinasi Pembangunan BCIC Denpasar;
- Pengawasan Pembangunan Gedung IMC Plered Purwakarta;
- Survei kepuasan dan registrasi tindak lanjut melalui aplikasi ALKI Intranew pada Satuan Kerja di BPSPMI;
- Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja TA 2023 dan Penyusunan *Risk Register* TA 2025 SMK SMTI Bandar Lampung, Politeknik STTT Bandung, Politeknik AKA Bogor, SMK SMAK Bogor.

b. Inspektorat II

- Pengawalan Kegiatan Seminar Nasional Indikasi Geografis Tahun 2024;
- Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau;
- Pleno dan Ekspos Hasil Evaluasi AKIP Tingkat Unit Eselon I;
- Pengawalan Pembongkaran Gedung BDI Denpasar Lama;
- Pengawalan Kegiatan Rakornas Program Penumbuhan dan Pengembangan IKMA Tahun 2025;
- Rapat Program Kerja Pokja Pemantauan Timnas P3DN;
- Pengawalan Pra-Event Bengkel Animasi *Digital Arts and Creative Festival (BEAST)* 2024;
- Pengawalan Kegiatan Rakornas Program Penumbuhan dan Pengembangan IKMA Tahun 2025;
- Koordinasi Pengawasan pada BPKP;
- Koordinasi dan Monitoring Persiapan Audit Kinerja pada BPIPI Sidoarjo;
- Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Provinsi Lampung;
- Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Industri Pengolahan dan/atau Pemurnian Logam Dasar;
- FGD Penyusunan Kebijakan Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar;
- Pengawalan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian IMEI;
- Survey Kepuasan Pelanggan pada Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali;
- *Business Matching* Industri Gim Nasional Tahun 2024.

c. Inspektorat III

- Melaksanakan Pengujian Substansi Audit Kinerja BSPJI Banjarbaru TA 2023;
- Melaksanakan Pengujian Substansi Audit Kinerja BSPJI Manado TA 2023;
- Bimbingan Teknis Manajemen Risiko BBSPJIKFK;

- Pertemuan Teknis Implementasi *Tariff Differential* dalam kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP);
- Melaksanakan Pengujian Substansi Audit Kinerja BSPJI Manado TA 2023;
- Ekspos Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal dan BSKJI;
- Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan TA 2023 pada BSPJI Surabaya;
- Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan TA 2023 pada BSPJI Bandar Lampung;
- Pengawalan Kegiatan Renovasi Gedung pada BBSPJIHPMM;
- Pengujian Substansi Audit Kinerja BSPJI Banda Aceh, BSPJI Medan, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Palembang TA 2023;
- Pengawalan Kunjungan Kerja ke BBSPJIT, BBSPIS dan BBSPJIKMN Satuan Kerja di Wilayah Bandung;
- Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik di Lingkungan APIP;
- Kunjungan Kerja ke Satuan Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru;
- Pengujian Substansi Audit Kinerja BSPJI Pekanbaru TA 2023, BSPJI Palembang TA 2023, BSPJI Pontianak TA 2023, BSPJI Ambon TA 2023, BSPJI Padang TA 2023, BBSPJIHPMM TA 2023, BBSPJIT TA 2023, BBSPJIKMN TA 2023;
- Survey Kepuasan Pelanggan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengujian Substansi Audit Kinerja BSPJI Pontianak TA 2023;
- Tindak Lanjut Hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja BBSPJI TA 2023;
- Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Surabaya;
- Survei Kepuasan Pelanggan Kegiatan Asistensi Manajemen Risiko pada BSPJI Surabaya;
- Survei Kepuasan dan Registrasi Tindak Lanjut melalui Aplikasi ALKI Intranew pada Satuan Kerja di Satuan Kerja di STTT bandung.

d. Inspektorat IV

- Cek Fisik Audit Ditjen IKFT TA 2023;
- Survei Lapangan dalam rangka Audit Investigasi Penyimpangan Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi;
- *Raising Awareness* INDI 4.0 dan Kick Off INDI 4.0 *Award* 2024 pada Sektor Industri Kimia Farmasi dan Tekstil;
- FGD Rekonsiliasi Data Ekspor dan Impor Bahan Kimia Daftar Tahun 2023;
- Rapat Pleno dan Ekspos Hasil Evaluasi AKIP Tingkat Unit Eselon I;
- FGD Evaluasi Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- Koordinasi dan Monitoring Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Cakupan Tugas Inspektorat IV;
- FGD Peningkatan Pemanfaatan Tarif Preferensi bagi Industri Dalam Negeri untuk Pengembangan Daya Saing Industri;
- Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pabrik GKR Tahun 2024;
- Lokakarya Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia dalam Kegiatan Usaha Industri Kimia dan Lokakarya Penerapan Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia;
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Industri Kimia Hulu Triwulan I Tahun 2024;
- Persiapan dan Pengawasan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pabrik Gula Kristal Rafinasi (GKR) Tahun 2024;
- Workshop Tata Kelola dan Pendataan Kawasan Industri Area Bekasi;
- FGD Sosialisasi Hasil dan Tindak Lanjut Perundingan INC-4;
- Pengawasan atas Kegiatan Evaluasi Kinerja Pabrik Gula Kristal Rafinasi (GKR) Tahun 2024;
- Pendampingan Pelaksanaan Monitoring Kemampuan Industri Dalam Negeri Produk Alsintan ber-TKDN;
- Menghadiri Undangan Business Matching Penggunaan Garam Farmasi Dalam Negeri untuk Produk Cairan Hemodialisa, Produk Infus, Vaksin dan Injeksi serta Produk Farmasi Lainnya;

- Pengawasan atas Kegiatan Evaluasi Kinerja Pabrik Gula Kristal Rafinasi (GKR) Tahun 2024;
- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri PT Megah Putih Raya Soda Sumatera;
- Menghadiri Undangan Rapat Harmonisasi 2 (Dua) Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Menghadiri Undangan FGD Penyusunan Usulan Draft Permenperin Keamanan dan Keselamatan Sektor Perindustrian;
- Menghadiri Undangan ECWP Launching Seminar: *IKCEPA on The Indonesia Manufacturing Sector*;
- Menghadiri Undangan Sosialisasi Regulasi Tata Kelola Penggunaan Aspal Buton di Indonesia dan Pengenalan Jenis Produknya;
- Verifikasi Penerapan Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label pada Bahan Kimia (GHS);
- Monitoring Kemampuan Industri Dalam Negeri Produk Alsintan ber-TKDN;
- Penyusunan Program Kerja dan Anggaran TA 2025;
- Kunjungan Kerja Kawasan Industri Sei Mangke;
- Cek Fisik Audit Ditjen KPAII TA 2023;
- Koordinasi dan Pengadministrasian Pelaksanaan Cek Fisik Audit Ditjen KPAII TA 2023;
- FGD Evaluasi Pengembangan Logistik Industri;
- Undangan FGD Monitoring Implementasi Harga Gas Bumi Tertentu Sektor Industri Keramik Kaca.

3. Kegiatan Dukungan Pengawasan

- a. Penyusunan laporan yang diselesaikan di Triwulan II Tahun 2024 adalah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal yang berbentuk Nota Dinas, Laporan PP39 Triwulan II Tahun 2024 Unit Eselon I dan II Inspektorat Jenderal, Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2024, Laporan Survei kepuasan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal Semester I.
- b. Pengembangan SDM
Kegiatan pengelolaan kepegawaian dalam hal pengembangan SDM yang dilakukan selama Triwulan II (April-Juni) adalah sebagai berikut:

Manajemen SDM APIP pada keikutsertaan diklat:

- a. Irman Setiadi (Diklat Pengadaan Barang dan Jasa);
- b. Diklat Audit Investigatif *level basic* diikuti oleh Auditor Pertama an. Sumaryono dan Ayu Budiarti;
- c. Hary Apriyandi (Diklat Penjenjangan Auditor Muda);
- d. Azka Rianto (Diklat Penjenjangan Auditor Muda dan *Probity* Audit Pengadaan Barang dan Jasa);
- e. Rachmat Muhbianto (Diklat Penjenjangan Auditor Madya);
- f. Agung Tri Utomo (Diklat Penjenjangan Auditor Madya);
- g. Rayersad Saesar (Diklat Penjenjangan Auditor Madya dan Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Fraud Risk Management Professional* (FRMP));
- h. Jelita Berlina (Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Fraud Risk Management Professional* (FRMP));
- i. Indra Laksmana (Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Fraud Risk Management Professional* (FRMP));
- j. Mokhammad Subuh (Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP));
- k. Dinavita Rizkyanti (Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP));
- l. Denny Chandra (Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP));
- m. Zita Tessa (Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP));
- n. Tjahyono (Pelatihan dan Sertifikasi (Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP));
- o. Giry Rachman (Pelatihan dan Sertifikasi *Certified Risk Management Professional* (CRMP));
- p. Jaenudin Sukrilah (Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama);
- q. Glory Meynar (Audit Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik);
- r. Zaky Al Afkar (Diklat Penjenjangan Auditor Muda);
- s. Akhmad Faiq (Diklat Penjenjangan Auditor Muda);
- t. Gun Gun (Diklat Penjenjangan Auditor Muda);
- u. Indra Irwan (Diklat Penjenjangan Auditor Muda);

- v. Eko Agus (Pelatihan dan Sertifikasi *Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE)*);
- w. Ciendy Martha Gayatri (Diklat *IT for Auditor*);
- x. Rizki Perdana (*Certified Government Accounting Associate*).

Sharing Knowledge

- 1. PKS Regulasi Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor;
- 2. PKS Reviu Atas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU).

Penerbitan Surat Keputusan/ SK:

- a. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Majalah Pengawasan Solusi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- b. Surat Keputusan Nomor 66 Tahun 2024/ SK KPA Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 157 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluator Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2023-2024;
- c. Surat Keputusan Nomor 67 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- d. Surat Keputusan Nomor 69 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- e. Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Teknologi Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- f. Surat Keputusan Nomor 71 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyiapan Bahan Materi Pimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;

- g. Surat Keputusan Nomor 72 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- h. Surat Keputusan 73 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kinerja Kearsipan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- i. Surat Keputusan Nomor 74 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- j. Surat Keputusan Nomor 75 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- k. Surat Keputusan Nomor 76 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR! di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- l. Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penggerak Budaya Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- m. Surat Keputusan Nomor 78 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- n. Surat Keputusan Nomor 79 Tahun 2024 SK Irjen Perubahan Pertama atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Protokoler di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;

- o. Surat Keputusan Nomor 82 Tahun 2024 SK KP Perubahan User Pejabat dan Operator Pengguna Aplikasi Sisten Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- p. Surat Keputusan Nomor 83 Tahun 2024 SK Irjen Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan, Moderator dan Narasumber dalam rangka Pelatihan di Kantor Sendiri secara Virtual di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2024;
- q. Surat Keputusan Nomor 86 Tahun 2024 SK Irjen Pengangkatan Pengemudi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024;
- r. Penerbitan Surat Keputusan/ SK Surat Keputusan Nomor 87 Tahun 2024 SK Pembentukan Tim Penilai Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2024.

Serta telah dilakukan: Sosialisasi Permenperin No 25 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas dan Sosialisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi PPNPN di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

- c. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
- i. Koordinasi dengan auditor pemeriksa untuk verifikasi kesesuaian dokumen tindak lanjut dengan rekomendasi hasil pengawasan internal, telah dilaksanakan koordinasi dan telah diverifikasi auditor dokumen dengan auditor pemeriksa;
 - ii. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Triwulan I Tahun 2024;
 - iii. Penyusunan Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 dan Tindak Lanjut SPI Tahun 2023 dan penelaahan Laporan dan Penyusunan Matriks Tindak Lanjut hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2023;
 - iv. Persiapan penilaian, koordinasi evaluasi dan pendampingan Pembangunan Zona Integritas tahun 2024;
 - v. Penyampaian Satuan Kerja yang dievaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2024 dan penyusunan Laporan Rapat Koordinasi Evaluasi Zona Integritas Tahun 2024;

Tabel 7 Unit Kerja Yang memperoleh Predikat WBK WBBM

No	Diusulkan untuk memperoleh predikat WBK	No	Diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM
1	BSPJI Palembang	1	BDI Surabaya
2	BSPJI Manado	2	BDI Jakarta
3	BDI Medan	3	BDI Yogyakarta
4	BSPJI Jakarta	4	BDI Denpasar
5	BSPJI Banda Aceh	5	BBSPJI Kerajinan dan Batik
6	BSPJI Medan	6	BDI Makassar
7	BBSPJI Selulosa	7	BSPJI Pekanbaru
8	BSPJI Ambon		

- vi. Persiapan Berita Acara Rekonsiliasi Capaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal;
- vii. *Focus Group Discussion* akselerasi implementasi program pengendalian gratifikasi;
- viii. Pada Triwulan II Tahun 2024, dilaksanakan pemantauan atas pelaporan strategi aksi pencegahan korupsi (Periode B18). Pada tanggal 13 Juni 2024, telah dilaksanakan Rapat Pelaporan Capaian Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi Triwulan II Tahun 2024 (Periode B18) yang telah membahas capaian pada Triwulan II Tahun 2024 untuk masing-masing *milestone* dari total 10 milestone yang perlu diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian pada Stranas PK periode 2023-2024. Pelaporan Strategi Aksi Pencegahan Korupsi Periode B18 dilaksanakan maksimal pada tanggal 28 Juni 2024;
- ix. Pemantauan pelaporan LHKAN untuk wajib Lapor yang belum menyampaikan Laporan;
- x. Proses LHE dan BA AKIP tingkat Unit Eselon I untuk siap ditandatangani dan siap dikirimkan kepada satuan kerja;
- xi. Penyampaian Laporan Realisasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi oleh Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG);
- xii. Pada 2024, telah dilaksanakan pengumpulan data untuk kebutuhan persiapan penilaian kapabilitas APIP Tahun 2024 yang meliputi rencana kegiatan pengawasan dan realisasinya pada tahun 2023 dan 2024, Audit Charter terbaru, dan Laporan atas hasil pengawasan dengan tema atau program terkait kemiskinan/stunting/Pembangunan Kawasan/ pariwisata / UMKM/Ketahanan Pangan. Pada Triwulan III Tahun 2024, akan segera dilaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024;

Pengelolaan SP4N Lapor dapat dilaporkan bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) laporan yang masuk ke SP4N Lapor!, dan seluruhnya telah didistribusikan dan ditindaklanjuti oleh Unit Eselon I terkait

- d. Penyelesaian Program, Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II 2024, yaitu:
 - a. Penelahaan terhadap pengajuan revisi DIPA Inspektorat Jenderal dalam rangka pencairan blokir anggaran;

- b. Identifikasi Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2024 dan 2025 dan Identifikasi potensi penggunaan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKU) pada Unit Inspektorat Jenderal untuk Tahun Anggaran 2025;
- c. Sosialisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025;
- d. Finalisasi Pengajuan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) Kegiatan Penerbitan Majalah SOLUSI;
- e. Penyusunan KAK dan RAB terkait pengajuan tambahan anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2025 sebesar Rp10 Miliar dimana Rp 8 Miliar dialokasikan untuk tambahan anggaran kegiatan pengawasan dan Rp2 Miliar untuk Belanja Modal Dukungan Kegiatan Pengawasan;
- f. Kompilasi dan Verifikasi pengajuan KAK dan RAB Inspektorat I - IV dan Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Tahun Anggaran 2025;
- g. Revisi Pengajuan Program dan Anggaran Tahun 2025 pada aplikasi "KRISNA" terkait anggaran, target output, serta dokumen KAK dan RAB;
- h. Mengikuti *Trilateral Meeting* (TM) Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan;
- i. Revisi DIPA ke-4 dalam rangka realokasi anggaran kegiatan pengawasan, realokasi anggaran pada sekretariat Inspektorat Jenderal meliputi perjalanan dinas, belanja modal kebutuhan kendaraan dinas, belanja modal kebutuhan rumah dinas, serta revisi administrasi halaman III DIPA;
- j. Revisi DIPA ke-5 dalam rangka revisi penarikan dana pada Halaman III DIPA menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor S-3876/WPB.12/2024 tanggal 20 Mei 2024 Hal Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA Dalam Rangka Penilaian Indikator Deviasi Halaman III DIPA Periode Triwulan II Tahun 2024;
- k. Koordinasi dan konfirmasi evaluasi SAKIP unit eselon I Kementerian Perindustrian, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8 Daftar Nilai SAKIP Eselon I Kementerian Perindustrian

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai AKIP
1	ITJEN	25,20	26,10	12,30	18,75	82,35
2	Ditjen IKMA	24,30	26,70	12,30	18,75	82,05
3	Setjen	25,20	26,10	10,80	18,75	80,85
4	BSKJI	24,30	25,20	12,30	18,75	80,55
6	Ditjen ILMATE	24,30	25,20	11,70	18,75	79,95
5	BPSDMI	24,60	24,60	11,70	18,75	79,65
7	Ditjen IA	22,80	25,20	12,30	18,75	79,05
8	Ditjen KPAIL	23,70	23,10	11,85	18,75	77,40
9	Ditjen IKFT	22,50	22,50	12,30	17,50	74,80

- I. Pembahasan Rancangan Awal Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2025-2029 serta diskusi dengan Biro Keuangan terkait indikator kinerja MRI Kementerian Perindustrian.

e. Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal Triwulan II (April- Juni) Tahun 2024

Tabel 9 Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II Tahun 2024

No	MAK/AKUN	Kegiatan	Jumlah	Nama Perusahaan	Keterangan
1	6036.EBA.951.051.A.532111	Pekerjaan pengadaan Filling Cabinet	Rp 15.000.000,-	PT.Kikayu Global Sentosa	Kontrak Tgl. 25 Maret 2024 Serah Terima Barang Tgl. 1 April 2024 Pembayaran Tgl. 3 April 2024
2	6036.EBD.965.051.G.522191	Pengadaan Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Acara (Event Organizer) Booth Keikutsertaan Expo BPKP	Rp 29.770.200	PT.Lynbest Jaya Sejahtera	Kontrak Tgl. 27 Mei 2024 Serah Terima Barang Tgl. 28 Mei 2024 Pembayaran Tgl. 10 Juni 2024
3	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Sofa Bench dan Meja Nakas Ruang Rapat Inspektorat Jenderal	Rp 84.320.000,-	PT. Hema Medhajaya	Kontrak Tgl. 4 Juni 2024 Serah Terima Barang Tgl. 10 Juni 2024 Pembayaran Tgl. 11 Juni 2024
4	6036.EBB.951.051.A.532111	Pengadaan Dispenser Inspektorat Jenderal	Rp 6.882.000,-	PT. Sinergi Solusi Sekawan pada Mbizmarket Bela Pengadaan	Surat Pesanan Tgl. 4 Juni 2024 Serah Terima Barang Tgl.10 Juni 2024 Pembayaran tanggal 11 Juni 2024
Total			Rp 135.972.200,-		

III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Meskipun kegiatan telah dilaksanakan, namun realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar 40,20%.

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan II, Inspektur Jenderal menginstruksikan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan agar dapat diselenggarakan pada awal triwulan III.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2024 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 (Januari-Juni) mencapai Rp20.110.163.675,- atau 40,20% dari total pagu anggaran sebesar Rp50.025.717.000, -. Dengan adanya jumlah yang di blok atau di revisi sebesar Rp2.423.664.000,-. Sehingga dengan demikian, dana yang tersedia saat ini untuk melaksanakan kegiatan sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp27.491.889.325,-. Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan manajemen pengawasan. Sehingga di akhir tahun 2024 perencanaan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal dapat tercapai dengan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum seluruhnya dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan persiapan, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Diharapkan Informasi capaian kinerja Triwulan II dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2024 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR DISPOSISI

☐ Rahasia

☐ Penting/Segera

☐ Biasa

Kode : 3/INT/M/2024 Itjen Tanggal : 24-01-2024



#214628383216206685 ----- 1E1CD

Nomor : B/23/IJ-IND/PR/I/2024 Tgl. 22-01-2024
Asal Surat : Inspektur Jenderal
Perihal : Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024
Keterangan : 1 (satu) Berkas Mohon TTD

Paraf Sesmen

DITERUSKAN KEPADA:

- ☐ Sekretaris Jenderal
☒ Inspektur Jenderal
☐ Direktur Jenderal Industri Agro
☐ Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
☐ Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
☐ Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka
☐ Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional
☐ Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
☐ Kepala Badan Pengembangan SDM Industri
☐ Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri
☐ Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi
☐ Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri
☐ Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0
☐ Staf Khusus Menteri
☐ Tenaga Ahli Menteri
☐

LAJUR DISPOSISI:

- | | |
|--|---|
| ☐ Siapkan Bahan
☐ Untuk ditindaklanjuti
☐ Bahas dengan saya
☐ Dipelajari/Dicermati
☐ Harap saran/Penjelasan
☐ Untuk diketahui/dipergunakan seperlunya | ☐ Agar dimonitor
☐ Segera buat laporan
☐ Siapkan konsep jawaban
☐ Tanggapan
☐ Mewakili Menteri
☐ Mendampingi
☐ Lain-lain |
|--|---|

Menteri Perindustrian

ny
1

Agus Gumiwang Kartasasmita

Perhatian:

1. Penyelesaian disposisi Menteri tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja
2. Pengembalian hasil koreksi Menteri harus diparaf kembali oleh pejabat terkait
3. Setelah diselesaikan harap dikembalikan pada Sekretaris Pribadi Menteri
4. Dilarang memisahkan sehelai suratpun dari berkas yang disusun ini



NOTA DINAS

Nomor : B/23/IJ-IND/PR/II/2024

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 22 Januari 2024

Dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2024. Apabila tidak ada pertimbangan lain, mohon Bapak dapat menandatangani dokumen yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas arahan dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL

M. RUM

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Rum
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Gumiwang Kartasasmita
Jabatan : Menteri Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Jakarta, Januari 2024

INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

**PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

TUJUAN

Kode	Sasaran Tujuan (ST)	Indikator Kinerja (IK)	Satuan	Target
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks	3.00
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Nilai	3,1

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Satuan	Target
SS.1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	Persen	0.8
		Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Inspektorat Jenderal	Persen	100
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	92,2
SS.2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Indeks	3.00

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Satuan	Target
SS.3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	Persen	85
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Nilai	3,1

MENTERI PERINDUSTRIAN



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Jakarta, Januari 2024
INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Satuan	Target
SS.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	Persen	90
SS.5	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	Persen	80
SS.6	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	Nilai	78,8

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Satuan	Target
SS.7	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	Nilai	72

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	Rp3.450.000.000
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	Rp3.450.000.000
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	Rp3.450.000.000
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	Rp3.450.000.000
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	Rp36.225.717.000
Total		Rp50.025.717.000

MENTERI PERINDUSTRIAN


AGUS GUMIWANG KARTASMITA

Jakarta, Januari 2024
INSPEKTUR JENDERAL


M. RUM



Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Cetak Laporan

No.	Indikator	Target Indikator	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Realisasi Indikator
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. S1 - Terwujudnya efektivitas dan efisiensi program kerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian													
	S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	0,8 persen	0%	0%	1%	0%	35%	0%	46%	0%	1%	0%	0 persen TW I : 0 II : 0 III : 0 IV : 0
	Pagu = Rp. 1.596.494.000 Realisasi = Rp. 5.700.001												
	S1.2 - Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal	100 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen TW I : 0 II : 0 III : 0 IV : 0
	Pagu = Rp. 0 Realisasi = Rp. 0												
	S1.3 - Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,2 Persen	0%	0%	0%	0%	33%	0%	100%	0%	0%	0%	0 Persen TW I : 72 II : 87 III : 0 IV : 0
	Pagu = Rp. 3.600.000 Realisasi = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 1.600.094.000												
	Total Realisasi Sasaran = Rp. 5.700.001 (0,4%)												
2. S2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik													
	S2.2 - Indeks Penerapan Manajemen Risiko Kemenperin *) IKU	3 indeks	13%	25%	38%	25%	63%	0%	100%	0%	25%	0%	0 indeks TW I : 0 II : 0 III : 0 IV : 0
	Pagu = Rp. 8.000.000 Realisasi = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 8.000.000												
	Total Realisasi Sasaran = Rp. 0 (0%)												
3. S3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif													
	S3.1 - Capaian IACM Itjen *) IKU	3,1 Nilai	0%	0%	2%	0%	3%	0%	5%	0%	1%	6%	0 Nilai TW I : 0 II : 0 III : 0 IV : 0
	Pagu = Rp. 492.472.000 Realisasi = Rp. 31.198.904												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 492.472.000												
	Total Realisasi Sasaran = Rp. 31.198.904 (6,3%)												
4. S4 - Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri													
	S4.1 - Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU	90 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%	0 Persen TW I : 35,9 II : 0 III : 0 IV : 0
	Pagu = Rp. 1.890.879.000 Realisasi = Rp. 641.157.415												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 1.890.879.000												
	Total Realisasi Sasaran = Rp. 641.157.415 (33,9%)												
5. S5 - Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif													
	S5.1 - Efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Persen TW I : 0 II : 0 III : 0 IV : 0

Pagu = Rp. 32.000.000

Realisasi = Rp. 0

Total Pagu Sasaran = Rp. 32.000.000

Total Realisasi Sasaran = Rp. 0 (0%)

6. S6 - Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel

S6.1 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,8 Nilai	18%	9%	35%	9%	44%	0%	52%	0%	27%	0%	0 Nilai TW I : 0 II : 70,3 III : 0 IV : 0
--	------------	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	--

Pagu = Rp. 31.700.000

Realisasi = Rp. 0

Total Pagu Sasaran = Rp. 31.700.000

Total Realisasi Sasaran = Rp. 0 (0%)

7. S7 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

S7.3 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	77 Nilai	35%	0%	55%	0%	85%	0%	100%	0%	55%	0%	0 Nilai TW I : 93,1 II : 0 III : 0 IV : 0
---	----------	-----	----	-----	----	-----	----	------	----	-----	----	--

Pagu = Rp. 3.600.000

Realisasi = Rp. 0

S7.1 - Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	76 Persen	19%	18%	38%	18%	56%	0%	76%	0%	32%	53%	0 Persen TW I : 0 II : 0 III : 0 IV : 0
---	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	--

Pagu = Rp. 30.382.996.000

Realisasi = Rp. 16.041.304.235

Total Pagu Sasaran = Rp. 30.386.596.000

Total Realisasi Sasaran = Rp. 16.041.304.235 (52,8%)

8. S8 - Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas

S8.2 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	0 Persen TW I : 0 II : 0 III : 0 IV : 0
---	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	--

Pagu = Rp. 23.400.000

Realisasi = Rp. 9.900.002

S8.1 - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	72 Nilai	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Nilai TW I : 0 II : 0 III : 0 IV : 0
--	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

Pagu = Rp. 0

Realisasi = Rp. 0

S8.3 - Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	78 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	28%	0 Persen TW I : 0 II : 0 III : 0 IV : 0
---	-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	--

Pagu = Rp. 839.115.000

Realisasi = Rp. 233.673.389

Total Pagu Sasaran = Rp. 862.515.000

Total Realisasi Sasaran = Rp. 243.573.391 (28,2%)

9. S9 - S9 - Gaji dan Tunjangan

S9.1. - Gaji dan Tunjangan	12 layanan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 layanan TW I : 0 II : 0 III : 0 IV : 0
----------------------------	------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

Pagu = Rp. 0

Realisasi = Rp. 0

Total Pagu Sasaran = Rp. 0

Total Realisasi Sasaran = Rp. 0 (0%)

Total Pagu Keseluruhan = Rp. 35.304.256.000

Total Realisasi Keseluruhan = Rp. 16.962.933.946 (48,0%)



Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Penetapan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung
1.	S1 - Terwujudnya efektivitas dan efisiensi program kerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal Target = 0,80 persen Pagu : Rp 1.596.494.000	- 960.051.D. Penilaian P3DN Kementerian Perindustrian Semester I [Lepas] Aktivitas Utama : 960.051. Pelayanan Organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi - 960.051.E Penilaian P3DN Kementerian Perindustrian Semester II [Lepas] Aktivitas Utama : 960.051. Pelayanan Organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi - 965.051.C Forum Rakorwas Koordinasi data hasil pengawasan [Lepas] Aktivitas Utama : 965.051 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal - 965.051.B Temu teknis penyuluhan/pemutakhiran data tindak lanjut [Lepas] Aktivitas Utama : 965.051 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal - 960.051.A. Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian [Lepas] Aktivitas Utama : 960.051. Pelayanan Organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi - 965.051.A Koordinasi dalam rangka pemutakhiran data tindak lanjut [Lepas] Aktivitas Utama : 965.051 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal - 960.051.C Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian [Lepas] Aktivitas Utama : 960.051. Pelayanan Organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi - 960.051.F. Monitoring dan Evaluasi P3DN ke Sektor [Lepas] Aktivitas Utama : 960.051. Pelayanan Organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi

- 960.051.B. Evaluasi Reformasi Birokrasi [Lepas]

Aktivitas Utama : 960.051. Pelayanan organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

Input Kegiatan >>

Input Kegiatan >>

S1.2 - Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal

100 Persen

Pagu : Rp 0

S1.3 - Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker

92,2 Persen

Pagu : Rp 3.600.000

- 955.051.B Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan [Lepas]

Aktivitas Utama : 955.051 Pengelolaan Keuangan

Input Kegiatan >>

Input Indikator >>

2. S2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

S2.2 - Indeks Penerapan Manajemen Risiko Kemenperin *) IKU

Target = 3,00 indeks

Pagu : Rp 8.000.000

- 954.051.I Penilaian Index Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian [Lepas]

Aktivitas Utama : 954.051. Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal

Input Kegiatan >>

Input Indikator >>

3. S3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif

S3.1 - Capaian IACM Itjen *) IKU

Target = 3,10 Nilai

Pagu : Rp 492.472.000

- 953.051.C Reviu Renstra Inspektorat Jenderal [Lepas]

Aktivitas Utama : 953.051 Pelaksanaan dan pemantauan Evaluasi

- 960.051.G. Penilaian IACM Inspektorat Jenderal [Lepas]

Aktivitas Utama : 960.051. Pelayanan Organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi

- 954.051.F Fasilitas Pemantauan Penerapan Kode Etik Auditor [Lepas]

Aktivitas Utama : 954.051. Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal

- 954.051.C Kegiatan Capacity Building pegawai Inspektorat Jenderal [Lepas]

Aktivitas Utama : 954.051. Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal

- 965.051.E Telaah Sejawat dengan APIP Kementerian Luar Negeri [Lepas]

Aktivitas Utama : 965.051 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal

- 954.051.J Pelantikan Pegawai Negeri Sipil [Lepas]

Aktivitas Utama : Pelantikan Pegawai Negeri Sipil

- 958.051.A. Penerbitan Majalah Solusi [Lepas]

Aktivitas Utama : 958.051. Pelayanan Hubungan Masyarakat

- 954.051.E Penyusunan pengembangan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal [Lepas]

Aktivitas Utama : 954.051. Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal

- 954.051.B Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja [Lepas]

Aktivitas Utama : 954.051. Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal

- 953.051.E Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan [Lepas]

Aktivitas Utama : 953.051 Pelaksanaan dan pemantauan Evaluasi

- 954.051.G Fasilitas Bebas Masa Tugas menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal [Lepas]

Aktivitas Utama : 954.051. Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal

- 952.051.B Penyusunan Anggaran TA 2024 [Lepas]

Aktivitas Utama : 952.051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

- 952.051.A Penyusunan dan Revisi anggaran TA 2024 [Lepas]

Aktivitas Utama : 952.051 Penyusunan Anggaran TA 2025

- 954.051.H. Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor [Lepas]

Aktivitas Utama : 954.051. Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal

Input Kegiatan >>

4. S4 - Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri

Input Indikator >>

S4.1 - Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Inspektorat Jenderal *)IKU

Target = 90,00 Persen

Pagu : Rp 1.890.879.000

- 951.051.A Peningkatan Fasilitas Perkantoran [Lepas]

Aktivitas Utama : 951.051. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

- 001.051.A. Pengadaan Peralatan TIK dan Aplikasi [Lepas]

Aktivitas Utama : 001.051 Pengadaan Perangkat TIK

Input Kegiatan >>

5. S5 - Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif

Input Indikator >>

S5.1 - Efektivitas regulasi bidang pengawasan yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal

Target = 80,00 Persen

Pagu : Rp 32.000.000

- 965.051.D Sosialisasi SOP/Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan [Lepas]

Aktivitas Utama : 965.051 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal

Input Kegiatan >>

6. S6 - Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang

Input Indikator >>

S6.1 - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal

- 953.051.A Pemantauan dan Evaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal [Lepas]

Berkualitas dan Akuntabel

Target = 78,80 Nilai

Pagu : Rp 31.700.000

Aktivitas Utama : 953.051 Pelaksanaan dan pemantauan Evaluasi

- 953.051.B Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal [Lepas]

Aktivitas Utama : 953.051 Pelaksanaan dan pemantauan Evaluasi

- 953.051.D Koordinasi Penilaian SAKIP Inspektorat Jenderal [Lepas]

Aktivitas Utama : 953.051 Pelaksanaan dan pemantauan Evaluasi

- 952.051.C Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal [Lepas]

Aktivitas Utama : 952.051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

Input Kegiatan >>

Input Indikator >>

7. S7 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

S7.3 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal

Target = 77,00 Nilai

Pagu : Rp 3.600.000

S7.1 - Tingkat Kepuasan Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal

76 Persen

Pagu : Rp 30.382.996.000

- 955.051.A Koordinasi dan Sinkronisasi keuangan dan BMN [Lepas]

Aktivitas Utama : 955.051 Pengelolaan Keuangan

Input Kegiatan >>

- 962.051.A Kebutuhan Umum di Lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal [Lepas]

Aktivitas Utama : 960.051. Pelayanan Umum dan Perlengkapan

- 994.002.D Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor [Lepas]

Aktivitas Utama : 994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- 994.002.B Biaya langganan dan operasional perkantoran [Lepas]

Aktivitas Utama : 994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- 994.002.C Koordinasi dan Layanan Pimpinan [Lepas]

Aktivitas Utama : 994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- 994.002.A Honorarium Operasional [Lepas]

Aktivitas Utama : 994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

- 994.001.A Pembayaran gaji dan tunjangan [Lepas]

Aktivitas Utama : 994.001 Gaji dan Tunjangan

- 962.051.B. Penataan Arsip dan Sistem Informasi [Lepas]

Aktivitas Utama : 962.051. Pelayanan Umum dan Perlengkapan

Input Kegiatan >>

8. S8 - Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas

[Input Indikator >>](#)

S8.2 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan

- 954.051.D Pelatihan di Kantor Sendiri [Lepas]

Aktivitas Utama : 954.051. Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal

Target = 75,00 Persen

Pagu : Rp 23.400.000

[Input Kegiatan >>](#)

S8.1 - Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal

[Input Kegiatan >>](#)

72 Nilai

Pagu : Rp 0

S8.3 - Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat

- 954.051.A Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat Jenderal [Lepas]

Aktivitas Utama : 954.051. Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal

78 Persen

Pagu : Rp 839.115.000

[Input Kegiatan >>](#)

[Input Indikator >>](#)

9. S9 - S9 - Gaji dan Tunjangan

S9.1. - Gaji dan Tunjangan

[Input Kegiatan >>](#)

Target = 12,00 layanan

Pagu : Rp 0

[Input Indikator >>](#)

[Input Sasaran >>](#)

TOTAL PAGU

Rp. 35.304.256.000

TRIWULAN II
2024



Kementerian PPN/
Bappenas



LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN



#247885

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

REKAP PELAPORAN KOMPONEN
TRIWULAN II (KUMULATIF)

Tahun : 2024
K/L : 019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
UK. Eselon I : 06 - Inspektorat Jenderal
UK. Eselon II : 05 - Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
1841.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
1	051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	Pelaksanaan	Melakukan Survei Kepuasan penggunaan Aplikasi ALKI untuk peginputan Berkas Tindak Lanjut; Telah menyusun KAK dan RAB TA 2025	75.00	Dokumen	4	3		138,860,000	118,308,620	85.20%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
1841.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
2	051 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat I	Pelaksanaan	Persiapan penyusunan Laporan PP39 TW III; Melakukan Survei Kepuasan penggunaan Aplikasi ALKI untuk penginputan Berkas Tindak Lanjut di cakupan tugas Inspektorat I di IFPK Kendal	53.00	Laporan	5	3		60,020,000	23,588,100	39.30%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
1841.EBD.965 - Layanan Audit Internal														
3	056 Evaluasi Kesiapan Balai Diklat Industri sebagai Center of Excellences pembangunan Tenaga Kerja Industri	Persiapan	Persiapan melakukan Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	17.00	Laporan	1	0		354,532,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
4	051 Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	Pelaksanaan	Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/Barang Milik Negara TA 2023 pada BDI Denpasar Pengawasan Pembangunan Gedung IMC Plered Purwakarta Pengawasan Pembangunan Gedung SMK SMAK Bogor Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja TA 2023 dan Penyusunan Risk Register TA 2025 pada Politeknik AKA Bogor Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja TA 2023 dan Penyusunan Risk Register TA 2025 pada SMK SMTI Bandar Lampung Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja TA 2023 dan Penyusunan Risk Register TA 2025 pada STTT Bandung Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja TA 2023 dan Penyusunan Risk Register TA 2025 pada SMK SMAK Bogor Reviu Revisi Anggaran pada BPSDMI	75.00	Laporan	30	23		1,357,138,000	997,295,414	73.49%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
5	052 Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	Pelaksanaan	Penggandaan dan penjiilidan laporan Reviu LKBMN dan pelaksanaan reviu pada bpsdmi dan sekjen	33.00	Laporan	6	36		339,846,000	101,000,000	29.72%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
6	053 Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	Pelaksanaan	Reviu SAKIP pada BSDMI dan SEKjen	35.00	Laporan	38	15		95,600,000	42,360,000	44.31%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
7	054 Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat I	Pelaksanaan	Pengawasan Pembangunan Gedung pada SMK SMAK Bogor, IMC Pleres dan Petrokimia Cilegon	33.00	Laporan	36	21		1,104,004,000	352,149,000	31.90%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
1842.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
8	051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	Pelaksanaan	-Telah disusun KAK dan RAB Pagu Tambahan Anggaran 2025; -Telah disusun Revisi Anggaran, RPD, dan KAK perubahan judul Monev 2024; - Rapat Penerapan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025	50.00	Dokumen	1	0	50 %	19,828,000	4,863,800	24.53%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada Masalah
1842.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
9	051 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II	Pelaksanaan	- Persiapan Penyusunan Laporan PP39 TW II; - Telah dilakukan sampling survey kepuasan pelanggan; - Menyusun capaian output bulan Juni 2024.	70.00	Dokumen	5	3	70 %	97,640,000	15,062,420	15.43%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada permasalahan
1842.EBD.965 - Layanan Audit Internal														
10	053 Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	Pelaksanaan	Telah selesai disusun LHE AKIP Unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat II	40.00	Laporan	4	2	45 %	863,222,000	7,664,100	0.89%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
11	055 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat II	Pelaksanaan	Telah dilaksanakan pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan Inspektorat II terhadap Dana Dekonsentrasi dan BPIPI Sidoarjo pada tanggal 30 Mei 2024.	40.00	Laporan	3	0	40 %	56,494,000	7,386,000	13.07%	Belum	Tidak Ada Masalah	Masih terdapat tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi
12	051 Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	Pelaksanaan	-Pelaksanaan Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 pada Disperindag Prov. Bali; - Pelaksanaan Audit Dana Dekonsentrasi TA 2023 pada Disperindag Prov. Lampung. - Masih dalam proses penyusunan LHA Audit Direktorat Jenderal ILMATE	32.00	Laporan	4	0	32 %	1,388,793,000	17,648,200	1.27%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
13	052 Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	Pelaksanaan	-Reviu Revisi DIPA Ditjen IKMA TA 2024; - Melaksanakan Reviu atas usulan Revisi Anggaran DIPA TA 2024	40.00	Laporan	12	6	40 %	139,769,000	82,891,990	59.31%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
14	054 Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	Pelaksanaan	-Melakukan pengawasan terhadap Rencana Pengalihan Tanah dan Perluasan Akses MASUK Ex Cevest. -Rapat pengalihan tanah dan perluasan akses masuk ex Cevest; -Rapat pelaporan capaian strategis nasional aksi pencegahan korupsi triwulan II; -Rapat Penjelasan Status Hardware Sistem CEIR; -Rapat Koordinasi Pengusulan Unit Kerja menuju WBKWBBM; -Pengawasan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sistem Pengendalian IMEI; -Pengawasan penjelasan status hardware sistem CEIR - Pengawasan penyusunan kebijakan industri pengolahan dan/atau pemurnian logam dasar -Pengawasan business matching industri gim nasional.	50.00	Laporan	2	1	45 %	884,254,000	572,651,310	64.76%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Inspektorat II akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA TA. 2024.
1843.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
15	051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	Pelaksanaan	Penyusunan KAK dan RAB pagu indikatif Inspektorat III TA 2025; Penyusunan revisi anggaran TA 2024	35.00	Dokumen	1	0		21,320,000	6,656,948	31.22%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
1843.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
16	051 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III	Pelaksanaan	Survey kepuasan pelanggan	65.00	Dokumen	5	3		116,720,000	65,526,883	56.14%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala
1843.EBD.965 - Layanan Audit Internal														
17	054 Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	Pelaksanaan	pengawasan kegiatan prioritas bbspjihpmm makasar, bbspjikmn bandunh, bbspjit bandung, bbspjis bandung	40.00	Laporan	27	11	4 Laporan	766,222,000	314,903,628	41.10%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada kendala
18	056 Evaluasi Kesiapan Lembaga Sertifikasi Produk TKDN dan industri Halal	Perencanaan	Tidak ada progress pelaksanaan kegiatan pada bulan ini	1.00	Laporan	1	0		189,464,000	0	0.00%	Belum	Anggaran	Anggaran Kegiatan ini termasuk anggaran yang diblokir AA
19	055 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat III	Persiapan	pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil audit bspji bandar lampung	17.00	Laporan	27	0		124,320,000	5,277,540	4.25%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada kendala
20	053 Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	Pelaksanaan	pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit BBSPJI dan BSPJI	50.00	Laporan	35	34		700,572,000	142,250,517	20.30%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak ada kendala
21	052 Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	Pelaksanaan	Reviu Anggaran BSKJI	29.00	Laporan	128	36	3 Laporan	444,631,000	147,706,900	33.22%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala
22	051 Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat III	Pelaksanaan	Lanjutan audit kinerja ltjen, audit kinerja BSPJI Medan, BSPJI Banda Aceh, BSPJI Palembang, BSPJI Pekan Baru;	40.00	Laporan	27	9	9 Laporan	1,086,751,000	257,899,220	23.73%	Sudah	Tidak Ada Masalah	tidak ada kendala
1844.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
23	051 Penyusunan Program Kerja dan Anggaran			0	Dokumen	0	0		14,548,000	0	0.00%	Belum		
1844.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
24	051 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV			0	Dokumen	0	0		74,960,000	0	0.00%	Belum		
1844.EBD.965 - Layanan Audit Internal														
25	051 Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV			0	Laporan	0	0		1,091,245,000	0	0.00%	Belum		
26	059 Monitoring dan Evaluasi Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Pada Satker Cakupan Tugas			0	Laporan	0	0		357,993,000	0	0.00%	Belum		
27	055 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat IV			0	Laporan	0	0		34,032,000	0	0.00%	Belum		
28	054 Konsulting dan Pengawalan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV			0	Laporan	0	0		1,187,532,000	0	0.00%	Belum		
29	053 Monitoring dan Evaluasi Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV			0	Laporan	0	0		631,230,000	0	0.00%	Belum		
30	052 Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV			0	Laporan	0	0		58,460,000	0	0.00%	Belum		
6036.CAN.001 - Pengadaan Perangkat TIK														
31	051 Pengadaan Perangkat TIK	Pelaksanaan	Perencanaan pembelian TIK dan Rapat Koordinasi Pengadaan Aplikasi	26.00	Unit	30	30		2,410,000,000	316,250,000	13.12%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6036.EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
32	051 Pelayanan Hubungan Masyarakat	Pelaksanaan	pengumpulan artikel	45.00	Laporan	3	0		234,420,000	24,186,816	10.32%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6036.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal														
33	051 Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan	Pengumpulan data dukung IACM	57.00	Dokumen	6	0		413,588,000	5,700,000	1.38%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6036.EBA.962 - Layanan Umum														
34	051 Pelayanan Umum dan Perlengkapan	Pelaksanaan	Pemenuhan kebutuhan umum bulan Mei	48.00	Layanan	1	0		3,163,752,000	1,239,385,524	39.17%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak ada masalah
6036.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
35	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor	48.00	Layanan	12	6		19,811,105,000	9,616,372,865	48.54%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
36	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor	48.00	Layanan	12	6		7,365,999,000	3,809,506,257	51.72%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6036.EBB.951 - Layanan Sarana Internal														
37	051 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	Pelaksanaan	Persiapan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	48.00	Unit	1	1		310,000,000	31,857,000	10.28%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6036.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
38	051 Pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal	Pelaksanaan	1. Hary Apriyandi (Diklat Penjurangan Auditor Muda) 2. Azka Rianto (Diklat Penjurangan Auditor Muda dan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa) 3. Rachmat Muhbianto (Diklat Penjurangan Auditor Madya) 4. Agung Tri Utomo (Diklat Penjurangan Auditor Madya) 5. Rayersad Saesar (Diklat Penjurangan Auditor Madya dan Pelatihan dan Sertifikasi Certified Fraud Risk Management Professional (FRMP) 6. Eko Agus (Pelatihan dan Sertifikasi Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) 7. Jelita Berlina (Pelatihan dan Sertifikasi Certified Fraud Risk Management Professional (FRMP) 8. Indra Laksmna (Pelatihan dan Sertifikasi Certified Fraud Risk Management Professional (FRMP) 9. Mokhammad Subuh (Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP) 10. Dinavita Rizkyanti (Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP) 11. Denny Chandra (Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP) 12. Zita Tessa (Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP) 13. Tjahyono (Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP) 14. Giry Rachman (Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (CRMP) 15. Jaenudin Sukrillah (Diklat Pembentukan Auditor Ahli Pertama) 16. Glory Meynar (Audit Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik) 17. Zaky Al Afkar (Diklat Penjurangan Auditor Muda) 18. Akhmad Faiq (Diklat Penjurangan Auditor Muda) 19. Gun Gun (Diklat Penjurangan Auditor Muda) 20. Indra Irwan (Diklat Penjurangan Auditor Muda)	29.00	Orang	107	7		1,133,757,000	246,985,000	21.78%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6036.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
39	051 Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Pelaksanaan	Revisi anggaran Inspektorat Jenderal ke 5 dan Persiapan penyusunan anggaran 2025	48.00	Dokumen	3	0		18,750,000	3,600,000	19.20%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6036.EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi														
40	051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan	laporan evaluasi kegiatan Itjen bulan Mei	53.00	Dokumen	16	7		33,600,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6036.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														
41	051 Pengelolaan Keuangan	Pelaksanaan	Pengumpulan dokumen dan penyusunan laporan keuangan dan BMN Audited semester I Tahun 2024	55.00	Layanan	5	2		7,200,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah
6036.EBD.965 - Layanan Audit Internal														
42	051 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal	Pelaksanaan	Pemantauan TLHP atas dana dekonsentrasi	34.00	Dokumen	23	2		1,323,546,000	29,770,200	2.25%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak ada masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal

Emil Satria



2023

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS